

BANK INFRASTRUKTUR

Kuncinya pada Pembiayaan Jangka Panjang

Surabaya, Kompas - Bank Indonesia sudah mempelajari bahwa sejumlah negara memiliki bank atau lembaga keuangan nonbank yang khusus membiayai infrastruktur. Namun, bank pembangunan semacam itu juga membiayai perkebunan dan pertanian yang seluruhnya berupa pembiayaan jangka panjang.

Akibat pembiayaan jangka panjang, bank komersial sulit untuk masuk wilayah ini karena umumnya bergantung pada sumber dana mahal jangka pendek, seperti deposito satu bulan.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengemukakan hal itu se usai meresmikan cagar budaya milik BI, yakni gedung bekas De Javasche Bank di Surabaya, pekan lalu. "Kuncinya adalah sumber dana harus jangka panjang. Kita perlu dana untuk pembangkit listrik, jalan, dan infrastruktur. Dari pengalaman negara lain, bank infrastruktur harus ada," kata Darmin.

Syarat agar bank infrastruktur berhasil adalah ada dasar hukum dalam pembiayaannya, lebih baik berupa undang-undang. Selain itu, inflasi negara di bank infrastruktur itu terkendali dan pada posisi rendah. Syarat lain harus dikelola secara profesional dan tidak diintervensi macam-macam.

"Bapindo pada masa lalu itu gagal karena tidak dikelola dengan baik," kata Darmin.

BI sebenarnya sudah mendesain transisi ke arah pembiayaan jangka panjang untuk bank infrastruktur. Namun, saat ini masih dalam proses berdiskusi dengan otoritas lain. "Saya belum akan bicara soal itu," kata Darmin.

Sebelumnya, ekonom Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tony Prasetyantono, memperkirakan perlu modal Rp 30 triliun untuk membentuk bank infrastruktur. Dengan modal sebesar itu, bank bisa memberikan pembiayaan Rp 200 triliun.

Saat ditanya mengenai sumber pembiayaan jangka panjang tersebut, Darmin memaparkan tiga hal.

Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus menjadi sebagian sumber pembiayaan.

Kedua, dana yang dibentuk dan dimiliki penuh oleh negara, yang diperoleh melalui penerbitan obligasi. "Dengan status investment grade, obligasi pemerintah bisa menjadi sumber pembiayaan," ujar Darmin.

Ketiga, sumber pembiayaan berupa dana badan usaha milik negara. Caranya, BUMN menerbitkan surat berharga yang dananya bisa digunakan untuk bank infrastruktur ini.

Kendati tidak anti-ide bank infrastruktur, ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad Wibowo, justru menyarankan penerbitan obligasi infrastruktur (infrastructure bond). Alasannya, perlu modal besar membentuk bank infrastruktur yang harus memenuhi rasio kecukupan modal minimum 8 persen.(IDR)

Source : KOMPAS

30 Januari 2012